



Tak ada yang bisa mengetahui pasti kapan bencana datang dan seperti apa dampak yang ditimbulkan. Namun prediksi dan antisipasi tetap bisa dilakukan. Kesiagaan dan upaca untuk menekan risiko bencana sedini mungkin perlu dimiliki oleh masyarakat akar rumput.

Hal itu dikemukakan Sigit Padmono dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana saat hadir dalam evaluasi program penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam pengurangan risiko bencana, Selasa (30/5).

Program tersebut merupakan kerja sama BNPB dengan Kementerian Luar Negeri Australia, yang dijalankan oleh Lembaga Penanggulangan bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU. Di Indonesia, program yang berjalan pada 2017 dan 2018 ini berjalan di Kabupaten Jepara dan Kudus (Jateng), serta Kabupaten Wajo dan Kabupaten Baru di Provinsi Sulsel.

Kemarin rombongan dari BNPB, LPBI NU pusat, perwakilan Kedutaan Australia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan LPBI NU Jepara bersilaturahmi ke Bupati Jepara Ahmad Marzuqi di setda. Hadir dua perwakilan Kedutaan Australia, Piter Edward dan Rachmi Anindita. Hadir pula Ketua LPBI NU pusat M Ali Yusuf, Kepala BPBD Jepara Lulus Suprayetno.

“Kesadaran untuk bersiaga terhadap bencana, mengurangi risiko seminimal mungkin, juga bagaimana masyarakat cerdas mengambil tindakan sangat perlu dimiliki oleh komunitas masyarakat yang paling bawah, seperti dalam sebuah keluarga, atau di RT (rukun tetangga), juga di desa. Ini penting karena persoalan penanganan bencana simpulnya ada di masyarakat, kalangan swasta, dan pemerintah,” kata Sigit Padmono.

Penerjemahan soal kesiagaan terhadap bencana ini bisa banyak hal. Sigit mencontohkan kelompok masyarakat yang membangun jalan, atau fasilitas umum. “Investasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur harus dilandasi pula dengan aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Bagaimana kalau sebuah jalan dibangun, system drainasenya dan kemungkinan dampak-dampaknya. Ini penting,” kata dia.

Ketua LPBI NU pusat M Ali Yusuf menjelaskan, kerja sama dengan DFAT (Kemenlu) Australia ini sudah berjalan setahun. Ia datang untuk mengevaluasi prpgram yang sudah dijalankan di Jepara, untuk melanjutkan program di 2018.

Dukungan Australia untuk program serupa dan dijalankan LPBI sebenarnya sudah ada sejak 2006, tanpa putus, untuk lembaga yang berbeda-beda. Inti program yang dijalankan adalah terus memperbaiki kapasitas kemandirian masyarakat dalam penanganan bencana.

Koordinator Program untuk lokal Jepara Asyhadi mengatakan, di Jepara ada tiga desa yang jadi sasaran untuk program tersebut, yaitu Sowan Kidul, Ketileng Singolelo dan Welahan. Selama program berjalan, masyarakat setempat dilibatkan dalam program peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana. Kemarin, rombongan menuju Desa Sowan Kidul untuk menggelar diskusi dengan masyarakat dan pemerintah desa setempat di balai desa Sowan Kidul.